

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan merupakan sebuah proses yang dilaksanakan untuk mencapai sebuah perubahan dengan melewati beberapa proses dan tahapan pembangunan yang mana semua itu tujuan utamanya ialah untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang makmur serta bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Pelaksanaan pembangunan desa, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, sangat jelas disebutkan dalam pasal 1 ayat 9 bahwa pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.¹

Mengingat pemerintah desa merupakan basis pemerintahan terendah dalam struktur pemerintahan Negara kita Indonesia. Sehingga, tepatlah jika wilayah desa menjadi sasaran penyelenggaraan aktifitas pemerintah dan pembangunan. Untuk melihat berhasil atau tidaknya usaha dalam pembangunan nasional secara keseluruhan.

Secara umum pembangunan desa berbentuk pembangunan fisik dan pembangunan non fisik atau mental spiritual. Pembangunan fisik dapat berupa pembangunan sarana dan prasarana, sedangkan pembangunan non fisik berupa pemberian kursus, penyuluhan tentang kesehatan, kewirausahaan, penyuluhan

¹ Rahardjo Adisasmita, *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), h. 55.

tentang hidup sehat dan lain-lain. Lahirnya UU No 6 tahun 2014 Tentang desa menjadikan adanya inovasi terhadap kebijakan serta tata kelola desa secara nasional. Dengan adanya UU desa juga telah mengangkat derajat kedaulatan desa yang mana sebelumnya bisa dibilang terkebelakang. Semua itu termuat pada ketentuan Pasal 3 dan 4 UU No.6/ 2014.²

Desa merupakan unit paling bawah dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Peran, fungsi dan kontribusinya menempati posisi yang strategis dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan itu akan sangat bergantung pada kesiapan desa dalam menata sistem pemerintahannya agar tercipta pembangunan yang efektif, efisien, transparansi dan akuntabel serta mendapat partisipasi dari masyarakat dalam menyelenggarakan pemerintahannya.

Pemerintah desa diyakini lebih mampu melihat prioritas kebutuhan desa dan masyarakat dibandingkan pemerintah kabupaten yang secara nyata memiliki ruang lingkup permasalahan yang jauh lebih luas. Untuk itu pembangunan pedesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, kebutuhan masyarakat, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan pedesaan yang telah ditetapkan.

Kepala desa merupakan penguasa tertinggi di desa dan sebagai pemimpin formal maupun informal, pemimpin yang setiap waktu berada ditengah-tengah rakyat yang dipimpinnya. Di pemerintahan desa juga terdapat aparat-aparat dan perangkat desa yang memiliki fungsi dan kewenangan masing-masing. Dimana

² Moejiarto Tjokrowinoto, *Pembangunan: Dilema dan Tantangan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 16.

fungsi dan kewenangan tersebut tercantum didalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa.³

Tidak dapat dipungkiri bahwasanya kita sangatlah memerlukan seorang pemimpin. Pemimpin sangatlah berpengaruh bagi yang dipimpin, maka dari itu ada syarat dan kriteria ketika ingin menjadi seorang pemimpin agar terciptanya kedamaian dan dapat mensejahterakan rakyat dengan adil dan benar, bertanggung jawab serta amanah.

Allah SWT berfirman dalam Q.S. Shad:26 :

يٰۤاٰدُوۡدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيۡفَةً فِى الْاَرْضِ فَاَحْكُمۡ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ ۗ اِنَّ الَّذِيۡنَ يَضِلُوۡنَ عَنۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيۡدٌۢ بِمَا نَسُوۡا يَوْمَ الْحِسَابِ

*“Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan”.*⁴

Menurut pengamatan penulis berdasarkan observasi awal yang telah dilakukan dengan narasumber Kepala Desa Megasari Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru⁵, penulis menemukan bahwa adanya permasalahan-permasalahan yang cukup rumit dan terkesan jarang ditemukan di desa lain yang

³ HAW Widjaja, *Otonomi Desa* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2003), h. 27.

⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Online dan Terjemahnya*

<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/38?from=26&to=88> (diakses pada 15 Juni 2023).

⁵ Ali Mukdin, Kepala Desa Megasari, Wawancara Pribadi, Kotabaru, 19 Januari 2023.

menimpa Desa Megasari tersebut. Permasalahan yang dihadapi Kepala Desa Megasari selama menjabat antara lain, adanya kasus prostitusi yang mencemari nama baik Desa Megasari, banyak nya kasus KDRT dan kenakalan remaja di Desa Megasari, tidak eratnya hubungan sosial masyarakat multietnis dan multiagama dimana hal ini sukar ditemukan di desa lainnya.

Di samping itu, pada tahun 2020, kepala desa dan perangkat desa menghadapi problematika yang serius yaitu pandemi Covid-19. Mengakibatkan dana desa terhadap pengembangan desa tidak diarahkan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa sehingga tidak bisa melanjutkan pembangunan untuk menyelesaikan keseluruhannya. Karena pemerintah mengubah pengelolaan dana desa untuk lebih di prioritaskan kepada perekonomian dan kesehatan masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.⁶

Berdasarkan hal-hal yang telah penulis dapatkan, kegiatan pemerintahan yang berlangsung di bawah kepemimpinan Kepala Desa Megasari periode (2018-2023) dalam mengatasi permasalahan di Desa Megasari terbilang rumit dan tidak biasa.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam dan terarah dengan membuat skripsi yang berjudul “Peran Kepala Desa dalam Pembangunan (Studi Kasus di Desa Megasari Kecamatan Pulaulaut Utara Kabupaten Kotabaru)”.

⁶ Wahab Tuanaya, Joana J. Tuhumury, dan Marno Wance, “Management Model and Village Fund Allocation During Pandemi Covid-19 in Waiheru Village Ambon City Indonesia”, *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology* vol. 17, no. 7.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran kepala desa dalam pembangunan di Desa Megasari Kecamatan Pulaulaut Utara Kabupaten Kotabaru?
2. Apa kendala yang di hadapi kepala desa dalam pembangunan di Desa Megasari Kecamatan Pulaulaut Utara Kabupaten Kotabaru?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran kepala desa dalam pembangunan di Desa Megasari Kecamatan Pulaulaut Utara Kabupaten Kotabaru.
2. Untuk mengetahui kendala yang di hadapi kepala desa dalam pembangunan di Desa Megasari Kecamatan Pulaulaut Utara Kabupaten Kotabaru.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu bermanfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat dari segi teoritis yaitu manfaat yang berguna untuk kepentingan Negara dan Masyarakat, khususnya berguna untuk kepentingan peneliti dan pembaca untuk memperkaya pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*), terkhusus bagi mahasiswa agar mampu menambah wawasan serta pemahaman ilmu pengetahuan yang diharapkan nantinya dapat menjadi sebagai salah satu bahan referensi

pengetahuan untuk kepentingan peneliti serta pembaca, memperkaya khazanah kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan sebagai bahan informasi bagi peneliti lain yang ingin meneliti masalah ini dari sudut pandang yang berbeda.

2. Manfaat Praktis

Manfaat dari segi praktis yaitu, memiliki kegunaan yang bersifat memberikan sumbangan pemikiran untuk perkembangan ilmu pengetahuan. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan referensi bagi masyarakat. Sebagai tugas akhir menyelesaikan jenjang pendidikan strata satu pada jurusan Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*) di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Serta Penelitian ini mampu dijadikan sebagai sumber pengetahuan yang memiliki manfaat dalam mengetahui bagaimana Peran Kepala Desa dalam Pembangunan (Studi Kasus di Desa Megasari Kecamatan Pulaulaut Utara Kabupaten Kotabaru).

3. Manfaat Akademis

Manfaat Akademis dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi penelitian bagi mahasiswa jurusan Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*) serta seluruh mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Berdasarkan pengertian judul diatas, penulis memberikan operasional untuk menghindari penafsiran yang luas dan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam interpretasi judul serta permasalahan yang akan diteliti maka diperlukan adanya batasan-batasan istilah sebagai berikut:

1. Peran

Peran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pemain atau tokoh utama.⁷ Peran bermakna seperangkat tingkah diharapkan yang dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Kata peran sering dikaitkan dengan posisi atau kedudukan seseorang. Adapun peran yang penulis maksud dalam penelitian ini ialah, sikap atau tindakan kepala desa dalam pembangunan, pemberdayaan, serta pengelolaan, desa apakah sudah berjalan dengan sebagaimana mestinya atau sebaliknya.

2. Kepala Desa

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang petunjuk pelaksanaan undang-undang desa, dalam struktur organisasi pemerintahan desa, disebutkan bahwa “Kepala desa adalah pemimpin Pemerintah Desa tertinggi yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat desa. Kepala desa diangkat dan dilantik oleh bupati melalui pemilihan langsung oleh warga desa negara Republik Indonesia dengan masa jabatan 6 (enam) tahun dan bisa dipilih kembali hanya untuk 1 (satu)

⁷ Kemendikbud Ristek RI, *KBBI Daring* <https://kbbi.web.id/peran.html> (diakses pada 29 April 2023).

kali masa jabatan selanjutnya.⁸ Kepala desa yang dimaksud penulis disini adalah Kepala Desa Megasari Kecamatan Pulaulaut Utara Kabupaten Kotabaru.

3. Pembangunan

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang disengaja atau secara sadar dilakukan yang bertujuan untuk mencapai sesuatu ke arah yang positif bagi anggota masyarakat secara keseluruhan. Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, institusi dan kebudayaan.⁹

Pembangunan juga berarti suatu proses pembaharuan yang terus-menerus dan berkelanjutan dari keadaan tertentu ke keadaan yang dianggap lebih baik atau pembangunan adalah kegiatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Visi pembangunan secara menyeluruh adalah terwujudnya masyarakat yang berkemajuan, mandiri, sejahtera, adil dan setia pada Pancasila dan UUD 1945.¹⁰

⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

⁹ Damsar Indrayani, *Pengantar Sosiologi Perdesaan* (Jakarta: Kencana, 2016), h. 207.

¹⁰ Rian Nugroho Dwidjowito, *Reinventing Pembangunan* (Jakarta: Alex Komputindo, 2001), h. 41.

F. Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka sebagai gambaran yang memiliki hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian terdahulu yang sejenis agar tidak terjadi pengulangan penelitian dan duplikasi.

Untuk memperjelas permasalahan yang ingin diteliti, maka penulis memerlukan adanya kajian pustaka untuk membedakan penulisan yang akan diteliti dengan penelitian maupun jurnal yang telah ada, diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Arifuddin Syah Putra mahasiswa Universitas Islam Negeri Suska Riau, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Program Studi Administrasi Negara dengan judul “Analisis Peranan Kepala Desa dalam Pembangunan Infrastruktur “Desa Pakning Asal” Kabupaten Bengkalis”.¹¹ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Pakning Asal dan bertujuan untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi oleh Kepala Desa Pakning Asal dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Penelitian yang diteliti oleh Arifuddin Syah Putra dengan penelitian penulis adalah sama-sama ingin mengetahui mengenai peran kepala desa dalam melaksanakan pembangunan dan kendala yang dihadapi. Adapun perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dimana peneliti melakukan penelitian di Desa Megasari Kecamatan Pulaulaut Utara Kabupaten Kotabaru bukan di Desa

¹¹ Arifuddin Syah Putra, *Analisis Peranan Kepala Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Pakning Asal Kabupaten Bengkalis* (Skripsi, Prodi Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Pekanbaru, Universitas Islam Negeri Suska Riau, 2022).

Pakning Asal Kabupaten Bengkalis. Selain itu, pada penelitian yang diteliti oleh Arifuddin Syah Putra lebih berfokus pada pembangunan infrastruktur.

2. Skripsi yang ditulis oleh Reri Anggraini mahasiswi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah) dengan judul "Peran Kepala Desa dalam Pengelolaan Pembangunan di Desa Kebo Kec. Lilirilau Kab. Soppeng (Telaah Siyasah Syar'iyah).¹² Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif lapangan, yang mana mengungkap fenomena sosial atau berbagai masalah yang muncul di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi kepala desa dalam menjalankan perannya terkait pengelolaan pembangunan desa, bertujuan untuk mengetahui realisasi pengelolaan pembangunan yang dilakukan kepala desa dan untuk mengetahui manfaat pengelolaan pembangunan yang dilakukan kepala desa. Penelitian yang diteliti oleh Reri Anggraini dengan penelitian penulis adalah sama-sama ingin mengetahui dan meneliti bagaimana peran kepala desa dalam pembangunan desa serta pengembangannya. Adapun perbedaannya, sangat jelas terlihat bahwa penelitian yang diteliti oleh Reri Anggraini tidak hanya berfokus pada peran kepala desa dalam pembangunan namun juga meneliti mengenai realisasi pengelolaan pembangunan dan manfaat pengelolaan pembangunan yang dilakukan oleh Kepala Desa Kebo Kec. Lilirilau Kab. Soppeng. Sedangkan pada penelitian

¹² Reri Anggraini, *Peran Kepala Desa dalam Pengelolaan Pembangunan di Desa Kebo Kec. Lilirilau Kab. Soppeng (Telaah Siyasah Syar'iyah)*, (Skripsi, Makassar, Prodi Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin, 2020).

ini, peneliti hanya berfokus pada peran kepala desa dalam pembangunan di Desa Megasari Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru serta kendala yang dihadapi. Selain itu, terdapat perbedaan juga pada lokasi penelitian yang dilakukan.

3. Skripsi yang ditulis oleh Khairul Rahman mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah) dengan judul "Peran Kepala Desa dalam Penyerapan Bantuan Dana Desa (Studi Kasus di Desa Tamban Baru Timur Kecamatan Tamban Catur Kabupaten Kapuas).¹³ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran kepala desa dalam penyerapan bantuan dana desa di Desa Tamban Baru Timur. Penelitian yang diteliti oleh Khairul Amin dengan penelitian penulis adalah sama-sama ingin mengetahui dan meneliti bagaimana peran kepala desa dalam pembangunan desa. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dimana peneliti melakukan penelitian di Desa Megasari Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru bukan di Desa Tamban Baru Timur Kecamatan Tamban Catur Kabupaten Kapuas dan pada penelitian yang diteliti oleh Khairul Amin, peneliti membandingkan mengenai efektifitas penyerapan dana pada periode kepemimpinan Kepala desa Tamban Baru Timur terdahulu dan yang Kepala Desa Tamban Baru yang menjabat saat dilakukannya penelitian. Sedangkan pada penelitian ini, peneliti hanya

¹³ Khairul Rahman, *Peran Kepala Desa dalam Penyerapan Bantuan Dana Desa (Studi Kasus di Desa Tamban Baru Timur Kecamatan Tamban Catur Kabupaten Kapuas*, (Skripsi, Prodi Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah), Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Banjarmasin, Universitas Islam Negeri Antasari, 2017).

berfokus pada peran Kepala Desa Megasari yang sedang menjabat mengenai pembangunan desa dan kendala yang dihadapi dalam periode kepemimpinannya serta tidak adanya perbandingan dengan kepala desa terdahulu.

4. Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume 10, Nomor 2, Juli 2019, Saharuddin, (Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin) dengan judul "Analisis Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Bonto Tallasa Kecamatan Ulu Era Kabupaten Bantaeng"¹⁴. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Bonto Tallasa Kecamatan Ulu Era Kabupaten Bantaeng serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, untuk mencapai tujuan tersebut, digunakanlah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan data secara deskriptif. Teknik pengumpulan data digunakan dengan cara observasi, wawancara, serta dokumen dan arsip dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Adapun persamaan pada penelitian kali ini yaitu sama-sama ingin mengetahui dan meneliti yang berkaitan dengan perkembangan terhadap pembangunan yang dilakukan, sifat penelitian sama-sama penelitian deskriptif kualitatif. Adapun Perbedaan diantara dua penelitian ini yaitu terletak pada lokasi penelitian dan untuk penelitian penulis berfokus pada peran kepala desa, sedangkan penelitian Saharuddin tidak hanya berfokus pada kepala desa saja tetapi juga meliputi Badan

¹⁴ Saharuddin, *Analisis Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Bonto Tallasa Kecamatan Ulu Era Kabupaten Bantaeng*, (Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin) Jurnal Ilmu Pemerintahan. Vol. 10, No. 2. Juli 2019

Permusyawaratan Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Rowlando Houtsma Siboro, mahasiswa Universitas Medan Area, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Pemerintahan, dengan judul *Peranan Kepala Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Pematang Panjang Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara*.¹⁵ Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif, adapun sifat penelitiannya bersifat deskriptif. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui peranan Kepala Desa dalam pembangunan infrastruktur dan bertujuan untuk mengetahui apa saja hambatan yang terjadi pada pelaksanaan pembangunan di Desa Pematang Panjang Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara. Penelitian yang diteliti oleh Rowlando Houtsma Siboro dengan penelitian penulis adalah sama-sama ingin mengetahui dan meneliti bagaimana peran Kepala Desa dalam pembangunan desa serta kendala atau hambatan yang dihadapi selama pelaksanaan pembangunan. Adapun perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dimana peneliti melakukan penelitian di Desa Megasari Kecamatan Pulaulaut Utara Kabupaten Kotabaru bukan di Desa Pematang Panjang Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah memahami materi dan tata urutan dalam penelitian ini maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

¹⁵ Rowlando Houtsma Siboro, *Peranan Kepala Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Pematang Panjang Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara*, (Skripsi, Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Medan, Universitas Medan Area, 2022)

BAB I Pada Bab ini memuat latar belakang masalah dari penelitian, kemudian permasalahan tersebut dijadikan sebagai rumusan masalah. Setelah itu tujuan penelitian, sejalan dengan apa yang menjadi rumusan masalah. Kemudian setelah tujuan terdapat signifikansi penelitian yang merupakan kegunaan dari hasil penelitian. Definisi operasional, agar menghindari terjadinya penafsiran lain dan memudahkan memahami maksud dari permasalahan yang akan diteliti. Selanjutnya, kajian pustaka yang disajikan sebagai informasi mengenai penelitian terdahulu yang mempunyai perbedaan ataupun persamaan dengan penelitian yang dilakukan. Dan sistematika penulisan yang digunakan untuk mempermudah mengetahui susunan skripsi secara keseluruhan.

BAB II Kajian Teori. Berisikan hal-hal yang berkaitan dengan penjabaran tentang teori, tentang peran kepala desa dalam pembangunan desa.

BAB III Metode Penelitian. Pada bab ini memuat tentang metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini. Berisikan jenis dan sifat penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Terakhir yaitu dengan teknik pengolahan dan analisa data.

BAB IV Pembahasan. Pada bab ini memuat penyajian data berupa bagian hasil penelitian mencakupi data pihak yang terkait dan hasil wawancara serta keadaan lapangan kemudian bagian hasil penelitian mengenai Peran Kepala Desa dalam Pembangunan di Desa Megasari Kecamatan Pulaulaut Utara Kabupaten Kotabaru.

BAB V Penutup. Pada bab ini berisikan tentang hasil kesimpulan dari semua pembahasan,selian itu juga memuat rekomendasi sebagai masukan pemikiran

terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan.